

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan yang menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia hal ini ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pada kenyataannya banyak kendala yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kendala yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat luas di Indonesia adalah semakin banyaknya tindak pidana terkait penyalahgunaan narkoba .

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan letaknya yang strategis sangat berpotensi menjadi tujuan utama peredaran gelap narkoba yang pada akhirnya menjadi tindak penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Menurut peraturan perundang-undangan, pengadaan narkoba hanya diberikan kepada instansi tertentu dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan namun pada

kenyataannya banyak pengadaan narkoba dilakukan secara ilegal. Saat ini dari segala aspek di masyarakat kian mempermudah meluasnya jaringan narkoba, melihat pada era globalisasi sekarang yang pergerakan utamanya adalah teknologi khususnya yang berkaitan dengan transportasi dan informasi, merupakan faktor pendukung peredaran gelap narkoba di Indonesia.<sup>1</sup>

Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Pada mulanya zat narkoba ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Semakin berkembangnya zaman dan bidang industri obat-obatan seperti narkoba maka jenis zat-zat narkoba semakin meluas pula dari segi cara pengolahannya.<sup>2</sup> Zat narkoba yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, dalam perkembangannya kemudian banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba tersebut dapat mengancam nilai-nilai kehidupan masyarakat dan bahkan melemahkan ketahanan nasional. Tindak Pidana narkoba dapat dikategorikan dengan :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba

---

<sup>1</sup>Tim penyusun: MD.Susilawati,.M.Hum, Dhanu koesbyanto, JA.bert T Lembang, 2011, *Beriman Ditengah Arus Global*, Cetakan Pertama,Gunung Sopai, Yogyakarta, hkm.72.

<sup>2</sup>Moh.Taufik Makaro, Suhasril,H.Moh.Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm17

- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan batasan mengenai pecandu, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Pasal 1 angka 15 menegaskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara esensial penyalah guna dapat disamakan dengan pecandu narkotika yakni sama-sama memakai atau menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Jadi, setiap penyalahguna dapat disamakan artinya dengan pecandu karena kriterianya sama yakni sebagai pengguna narkotika. Adapun kriteria pembeda antara orang yang menyalahgunakan narkotika dengan pecandu terletak pada tingkat ketergantungan narkotika yang sangat tinggi dari sipecandu.

---

<sup>3</sup> Pasal 129 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas memberikan penerapan sanksi hukum bagi para pecandu dan penyalah guna narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.<sup>4</sup> Bagi para penyalahguna narkotika terdapat pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa :

(1) Setiap penyalah Guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah

---

<sup>4</sup> Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian karya tulis ilmiah ini dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang narkoba dan memberikan informasi serta sumbangan literatur sebagai panduan dalam penelitian dibidang narkoba

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan khususnya bagi pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum dibidang narkoba. Pihak-pihak yang terkait antara lain aparat penegak hukum meliputi Hakim, Jaksa, Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional.

### **E. Keaslian Penelitian**

Skripsi dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” merupakan karya asli, dan sepengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian dengan judul penelitian yang peneliti angkat, jadi penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu:

1. Skripsi dari Indranas Gaho, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, *“Pertimbangan Polisi Dalam Menentukan Tindak Pidana dan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup Dalam Penyalahgunaan Narkotika”*. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah
  - a. Bagaimana pertimbangan polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam penyalahgunaan narkotika?
  - b. Hambatan apakah yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi untuk menentukan seorang yang diduga atau tersangka sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika?

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangka penyalahgunaan narkotika apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi untuk menentukan seseorang yang diduga atau tersangka

sebagai pelaku atau korban penyalahguna narkoba yaitu : 1) faktor sumber daya manusia, 2) faktor anggaran yang dana minim, 3) faktor waktu khusus

2. Skripsi dari Agus Victor Sanjaya hutabarat, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, *“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Korban Tindak Pidana Narkoba”*. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah apa yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap korban tindak pidana narkoba?”

Berdasarkan hasil penelitian dalam memutus perkara Tindak Pidana Narkoba terhadap korban penyalahguna narkoba hakim mempunyai kesulitan untuk menjatuhkan pidana walaupun telah memperoleh bukti-butki yang kuat tentang terdakwa sebagai korban tindak pidana narkoba hal ini disebabkan karena hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi melihat adanya fakta-fakta hukum lain berdasarkan keterangan saksi yang memberatkan atau meringankan terdakwa.

3. Skripsi dari David Manuel Pangaribuan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, *”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Daerah Istimewa Yogyakarta”* permasalahan dalam penelitian tersebut adalah apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba yang

berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan perlindungan hukum yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari cara bahwa korban penyalahgunaan narkoba yang dijatuhi hukuman pidana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
3. Rehabilitasi medis adalah adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba
4. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian



Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia , Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkoba Nasional RI :

a) NOMOR: 01/PB/MA/III/2014

b) NOMOR: 03 TAHUN 2014

c) NOMOR: 11 TAHUN 2014

d) NOMOR: 03 TAHUN 2014

e) NOMOR: PER-005/A/JA/03/2014

f) NOMOR: 1 TAHUN 2014

g) NOMOR: PERBER/O1/III/20

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban  
Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011  
tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang  
Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu  
Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi  
Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : buku, jurnal, artikel dan literatur  
lainnya yang berkaitan dengan permasalahan Dasar Pertimbangan Hakim  
Dalam Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Daerah  
Istimewa Yogyakarta

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan  
dengan mempelajari putusan pengadilan dan wawancara dengan narasumber  
berkaitan dengan permasalahan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan  
Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta .

#### 4. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis dengan penalaran secara deskriptif kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas yang ada. Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Guna mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian, subyek penelitian, teknik

pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir bab ini disajikan sistematika penulisan hukum

## BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan pembahasan yang meliputi: Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Narkotika, Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Penerapan sanksi Terhadap Pecandu Narkotika. Pada bab ini juga dibahas mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika

## BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang kajian mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN